

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Kesimpulan

Turki adalah negara yang heterogen, terdiri dari kelompok-kelompok minoritas agama dan etnis termasuk Kurdi, Laz, Çerkes, Roma, Alevi, Syriacs, Arab, Yunani, Armenia, Yahudi dan lain-lain, di samping mayoritas Turki. Suku Kurdi adalah salah satu masyarakat adat dari dataran Mesopotamia dan dataran tinggi, yang sekarang berada di selatan dan timur Turki, utara dan timur Suriah, Irak utara, utara dan barat Iran dan selatan dan barat Armenia. Antara 25 dan 35 juta orang Kurdi menghuni wilayah pegunungan di perbatasan Turki, Irak, Suriah, Iran dan Armenia. Setelah kudeta militer September 12, 1980, semua kelompok budaya dan politik nasionalis Kurdi dilarang, bersama dengan kelompok-kelompok kiri dan kanan. Lalu ini menjadikan peluang terbuka untuk Partai Pekerja Kurdistan (PKK) sebuah kelompok bawah tanah dengan orientasi Marxis-Leninis pada saat itu yang melancarkan perjuangan bersenjata melawan negara Turki pada tahun 1984. Sejak saat itu, militer Turki telah berjuang menanggulangi PKK. Dan sepanjang tahun 1980 dan 90-an PKK berusaha untuk membangun negara Kurdi terpisah. Sekarang kelompok bersenjata ini berjuang untuk hak-hak budaya dan politik untuk Kurdi di Turki. Selama 25 tahun terakhir, militer Turki dan Kurdistan Partai Buruh (PKK) telah terkunci dalam konflik di provinsi bagian tenggara dan timur Turki. Pertempuran itu telah menewaskan sekitar 44.000 orang (termasuk anggota PKK, masyarakat sipil dan anggota keamanan negara). Sejak Mei 2010, PKK telah melakukan serangkaian serangan mematikan terhadap sasaran militer dan polisi.

Gerakan pemberontak Kurdi telah dianggap sebagai gerakan separatisme yang berbahaya bagi pemerintah Turki karena gerakan tersebut mengancam kedaulatan dan keutuhan wilayah Turki. Pemberontakan Kurdi telah memasuki arena politik Turki dengan membentuk partai politik yang radikal dan mampu menghadapi tekanan Negeranya. Sejak tahun 1970-an, kaum revolusioner Kurdi telah berjuang untuk

kemerdekaan mereka di Wilayah Turki di mana etnis Kurdi membentuk mayoritas etnis Kurdistan. Kerusuhan sipil ini telah meletus menjadi perang pantang menyerah antara Turki dan Kurdi atas keinginan untuk Kurdistan independen di perbatasan timur Turki. Munculnya PKK pada tahun 1970, PKK lahir sebagai gerakan Kurdi Marxis-Leninis, yang didirikan dan dipimpin oleh Abdullah Ocalan. PKK menyerukan sebuah negara merdeka bagi orang Kurdi, dan melancarkan serangan bersenjata pertama, pada 15 Agustus 1984, di wilayah Eruh dari provinsi tenggara Siirt.

Pada tahun 1993, PKK mengumumkan gencatan senjata sepihak, tetapi sementara itu membantai 33 tidak bertugas, tentara bersenjata dan lima warga sipil. Antara tahun 1984 dan 2008, PKK dilakukan 43.455 kegiatan teroris di Turkey. Selama periode ini, 4.967 personel angkatan bersenjata Turki, 1.335 penjaga desa sukarela dan 217 petugas polisi tewas. Sementara itu, 44.553 anggota PKK tewas atau ditangkap. Sejak musim panas 2011, konflik menjadi meningkat. PKK juga telah melancarkan kegiatan kriminal yang signifikan dalam Eropa, mulai dari pemerasan dan perdagangan obat-obatan untuk penyelundupan imigran ilegal ke negara-negara Uni Eropa. Kelompok ini juga mendatangkan keuntungan dengan menjalankan media (harian, majalah, dan TV dan saluran radio) untuk membantu kegiatan propaganda anti Turki di banyak bagian dunia. Akhirnya pembicaraan penekanan gencatan senjata antara pemerintah Turki dan PKK damai dimulai pada tahun 2012, namun nyatanya pembicaraan tersebut gagal yang menyebabkan gencatan senjata terjadi lagi pada bulan Maret 2013. Sampai baru-baru ini PKK telah mulai lagi serangan di Turki. Dan serangan terakhir telah dikutuk oleh PBB.

Dalam rangka mengatasi gangguan keamanan yang terus-menerus dilancarkan oleh para gerilyawan PKK, Turki berupaya menjalin kerjasama berupa penciptaan keamanan bersama untuk menumpas serangan PKK. Antara lain Pemerintah Turki menganggap menjalin kerjasama dengan pemerintah Iran merupakan suatu langkah penting dalam menumpas gerakan separatisme Kurdi. Permasalahan antara pemberontak Kurdi dengan pemerintah Turki juga menimbulkan kerugian bagi pemerintah Iran. Turki memutuskan untuk melancarkan

kerjasama diplomatik dengan pemerintah Iran untuk sama-sama menjaga keamanan wilayah perbatasannya masing-masing dari ancaman terror pemberontakan Kurdi. Pada tahun 2011, Amerika Serikat dan Turki menjalin kerjasama intelejen untuk membantu Turki kembali mendapatkan power untuk melawan PKK. Setelah pertemuan ini, pusat koordinasi intelijen didirikan di Ankara dan Turki menggunakan real-time intelijen AS untuk meluncurkan serangan udara utama lintas batas pada pertengahan Desember 2011. Pada akhir 2011, Turki telah menerima kerjasama langsung dari AS dalam melawan PKK, seperti memperoleh peralatan yang lebih canggih untuk meningkatkan kemampuan kontraterorisme sendiri. Amerika Serikat juga memberi Turki lampu hijau untuk mengambil tindakan militer terhadap sasaran-sasaran PKK di Irak Utara, dengan Israel membantu tentara Turki dengan peralatan yang canggih.

Pada tahun 2012, Perdana Menteri Recep Tayyip Erdogan memerintahkan babak baru pembicaraan damai dengan pemimpin PKK Abdullah Ocalan, pada Maret 2013, Ocalan mengumumkan gencatan senjata sepihak dan meminta PKK untuk menarik diri dari Turki. Satu tahun kemudian, parlemen Turki menyetujui kerangka hukum untuk negosiasi. Namun proses damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak dirasa gagal. PKK menerima proposal baru Ocalan dan mengumumkan gencatan senjata sepihak pada tanggal 23 Maret 2013. Sementara itu, persyaratan perjanjian baru antara negara dan Ocalan / PKK menjadi jelas. Sadullah Ergin, Menteri Kehakiman dan tokoh sentral di babak ketiga dari proses perdamaian, menyatakan bahwa proses akan terdiri dari tiga tahap: gencatan senjata dan penarikan PKK, demokratisasi, dan pelucutan senjata dan normalisasi.

IV.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian upaya Pemerintah Turki dalam menangani ancaman militan kurdistan atau PKK tahun 2011-2015, berikut saran-saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya, antara lain perlu dilakukan kajian dan analisa lebih mendalam terhadap langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Turki dalam menghadapi PKK untuk meminimalisir jumlah korban baik sipil Turki

dan Kurdistan. Selain itu, perlu dianalisa lebih dalam terkait kebijakan Pemerintah Turki yang dapat menyebabkan diskriminasi atas hak-hak etnis Kurdistan.

